

ABSTRAKSI

Setiap Perseroan Terbatas (PT) pastilah memiliki nama yang digunakan sebagai identitas dari PT tersebut. Mengenai nama PT diatur dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007. Apabila suatu PT hendak melakukan perubahan nama maka PT harus melakukan perubahan anggaran dasar dimana menurut ketentuan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 setiap perubahan atas anggaran dasar wajib dilakukan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Apabila perubahan nama tidak dilakukan melalui RUPS maka atas perubahan tersebut tidak sah sehingga PT setelah perubahan nama bukanlah badan hukum yang dapat melakukan perbuatan hukum. Apabila timbul kerugian maka pihak yang merasa dirugikan dapat meminta pertanggung jawaban dari pengurus PT yang melakukan perubahan nama. Dalam penulisan tesis ini, penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual.

Kata kunci : **PT, nama PT, RUPS.**

